



Perencanaan Pembangunan Fasilitas Publik Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Pembangunan Bendungan Seratak di Kabupaten Kotabaru

Rahmat Nur¹⁾, Erlina²⁾, Rachmat Hidayat³⁾, Ismar Hamid⁴⁾, Yusril⁵⁾, Muhammad Rifani⁶⁾

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat¹⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat^{2),5)}

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotabaru³⁾

Program Studi Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat^{4),6)}

rahmat.nur@ulm.ac.id¹⁾

erlina@ulm.ac.id²⁾

rch_hidayat@yahoo.com³⁾

ismar.hamid@ulm.ac.id⁴⁾

yusrikarcha@gmail.com⁵⁾

rifanimuhammad83@gmail.com⁶⁾

Abstrak

Pembangunan fasilitas publik yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis, tetapi juga mengutamakan partisipasi aktif masyarakat. Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menghadapi permasalahan ketersediaan air bersih yang semakin kompleks, terutama pada musim kemarau. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembangunan Bendungan Seratak sebagai salah satu solusi penyediaan air bersih dan irigasi pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pembangunan Bendungan Seratak dengan menekankan peran masyarakat dalam setiap tahapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta analisis dokumen, termasuk Detail Engineering Design (DED) dan studi kelayakan yang disusun oleh Dinas PUPR dan Bappeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sungai Seratak memiliki debit air yang cukup besar (600–700 l/detik) dengan kualitas air yang sebagian besar memenuhi standar baku, sehingga layak dijadikan sumber utama pasokan air. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan air bersih dan irigasi meningkatkan efektivitas desain proyek dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik. Dukungan politik dari DPRD dan pemerintah pusat turut memperkuat potensi keberhasilan pembangunan ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan berbasis masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan penerimaan sosial proyek. Rekomendasi utama adalah memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi penganggaran, dan membangun model kolaborasi multi-stakeholder dalam pembangunan fasilitas publik di masa depan.

Kata kunci: Perencanaan partisipatif, pembangunan berbasis masyarakat, Bendungan Seratak, fasilitas publik, Kotabaru

Abstract

Sustainable public infrastructure development requires an approach that integrates both technical feasibility and active community participation. Kotabaru Regency, South Kalimantan, faces increasing challenges in securing clean water, particularly during the dry season. To address this issue, the local government has

planned the construction of the Seratak Dam, aimed at providing a reliable source of clean water and irrigation for surrounding communities. This study aims to analyze the planning process of the Seratak Dam project with a specific focus on community involvement at each stage. A case study approach was adopted, employing in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and document analysis, including the Detail Engineering Design (DED) and feasibility studies prepared by the Department of Public Works and Bappeda. Findings reveal that the Seratak River provides a substantial water flow (600–700 l/s) and generally meets quality standards, making it a viable source for the dam project. Moreover, community participation in identifying clean water and irrigation needs enhances project design effectiveness and fosters a sense of ownership over the planned infrastructure. Political support from the Regional House of Representatives and coordination with central government authorities further strengthens the likelihood of successful implementation. This study concludes that a community-based planning model significantly contributes to project sustainability and social acceptance. It is recommended to strengthen participatory mechanisms, ensure budget transparency, and foster multi-stakeholder collaboration for future public infrastructure developments.

Keyword: Participatory planning, Community-based development, Seratak Dam, Public facilities, Kotabaru

PENDAHULUAN

Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan air bersih yang kerap menjadi masalah krusial, terutama saat musim kemarau. Berkurangnya debit air pada sumber baku utama seperti Waduk Gunung Ulin mengakibatkan distribusi air PDAM menjadi tidak merata dan bahkan terhenti di beberapa daerah. Masyarakat di wilayah Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, dan Pulau Laut Sigam menjadi kelompok paling terdampak karena harus membeli air bersih dari pengecer dengan harga tinggi, mencapai Rp70.000 per tandon berkapasitas 1.200 liter. Kondisi ini memunculkan ketimpangan akses air bersih antarwilayah dan memperburuk kualitas hidup masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas PUPR telah menyusun *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan embung atau intake (IKK) di Sungai Seratak. DED ini ditargetkan selesai pada akhir 2023 sebagai dasar pelaksanaan proyek. Namun, implementasinya sangat bergantung pada penganggaran daerah, di mana proyek ini direncanakan masuk dalam APBD Perubahan 2024 atau, jika belum memungkinkan, akan diajukan kembali dalam perencanaan anggaran 2025 ((Dinas PUPR Kotabaru).

Hasil studi kelayakan Bappeda menunjukkan bahwa Sungai Seratak memenuhi tiga aspek penting sebagai sumber air baku, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Debit air sungai yang mencapai 600–700 liter per detik dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mengakomodasi irigasi pertanian di wilayah sekitar. Fakta ini menjadikan Sungai Seratak sebagai pilihan strategis dalam upaya menyediakan pasokan air bersih yang berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru (Bappeda Kotabaru, 2024).

Meski aspek teknis sudah terbukti layak, proyek pembangunan Bendungan Seratak masih menghadapi tantangan serius dari sisi prosedural dan pendanaan. Keterbatasan anggaran daerah membuat proses realisasi memerlukan sinergi lintas lembaga antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kementerian PUPR. Selain itu, diperlukan upaya ekstra untuk memastikan proyek ini masuk dalam prioritas pembiayaan nasional sehingga pelaksanaannya tidak terhambat hanya karena keterbatasan pagu anggaran. Dukungan legislatif juga menjadi faktor penting dalam percepatan proyek ini. Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, menegaskan bahwa DPRD akan mendukung penuh realisasi pembangunan embung Seratak, termasuk dari sisi penganggaran. Menurutnya, setelah DED selesai, pemerintah harus segera memulai pelaksanaan proyek agar masyarakat tidak lagi mengalami krisis air bersih yang berulang setiap tahunnya.

Komitmen Pemerintah Daerah juga tampak jelas. Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, menyatakan bahwa pembangunan Bendungan Seratak adalah salah satu program prioritas untuk mengatasi permasalahan air bersih dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, penyediaan infrastruktur pengelolaan air baku yang memadai akan membawa dampak ekonomi

positif bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi lokal.

Namun, di balik potensi besar proyek ini, terdapat tantangan lain yang perlu diatasi, seperti persoalan pembebasan lahan dan penyesuaian status kawasan. Beberapa kasus pembangunan embung di daerah lain menunjukkan bahwa tanpa koordinasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat, proses implementasi seringkali tertunda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengurangi hambatan teknis, sosial, dan administratif.

Beberapa penelitian terdahulu (misalnya, Arifin, 2022; Wahyudi, 2023; dan Guampe, 2024) telah menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur air bersih berbasis masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknis penyediaan air dan belum banyak menggali dimensi sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Dalam konteks Kotabaru, studi yang menelusuri bagaimana masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan pembangunan bendungan masih terbatas, padahal keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberlanjutan proyek dan penerimaan sosial terhadap kebijakan pembangunan air baku.

Dari celah tersebut, terlihat adanya gap penelitian yang ingin dijawab oleh studi ini, yaitu minimnya kajian empiris mengenai model perencanaan pembangunan infrastruktur air berbasis masyarakat di wilayah kepulauan. Penelitian sebelumnya cenderung menekankan aspek kelayakan teknis dan ekonomi, sedangkan dimensi partisipasi sosial, tata kelola kolaboratif, serta mekanisme komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat belum menjelaskan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dalam bentuk analisis kualitatif yang menggali peran aktor-aktor lokal, dinamika sosial, serta strategi partisipatif dalam perencanaan Bendungan Seratak.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik tidak hanya soal kelayakan teknis, tetapi juga legitimasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini berupaya memahami proses perencanaan Bendungan Seratak secara komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan, partisipasi masyarakat, hingga koordinasi lintas lembaga. Temuan ilmiah yang diharapkan adalah model perencanaan partisipatif yang mampu memperkuat ketahanan air, pemerataan akses sumber daya, dan keberlanjutan sosial-ekologis. Dengan demikian, pembangunan Bendungan Seratak dapat menjadi model pengelolaan fasilitas publik berbasis masyarakat yang efektif, adaptif, dan inklusif bagi wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kotabaru.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan 12 informan utama yang terdiri dari berbagai pihak terkait dalam proses perencanaan pembangunan Bendungan Seratak di Kabupaten Kotabaru. Informan tersebut meliputi tiga pejabat dari Dinas PUPR Kotabaru, dua anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, tiga tokoh masyarakat dari wilayah terdampak, dua perwakilan warga dari kelompok pemuda dan perempuan, serta dua wakil pihak swasta yang memiliki keterlibatan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka terhadap proses perencanaan proyek. Setiap informan diwawancarai secara mendalam untuk menggali pandangan, pengalaman, dan peran mereka dalam penyusunan rencana pembangunan bendungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial dan kelembagaan yang terjadi dalam proses perencanaan berbasis masyarakat.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik agar hubungan antar kategori lebih

mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap selama proses analisis dengan melakukan triangulasi sumber dan metode, guna memastikan keabsahan data dan menghindari bias interpretasi. Proses analisis ini menghasilkan temuan mendalam mengenai pola kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Bendungan Seratak yang partisipatif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa di sekitar bendungan Sungai Seratak memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan bendungan. Masyarakat terlibat aktif melalui berbagai forum seperti Musyawarah Desa, FGD (Focus Group Discussion), dan Musrenbang Kecamatan, di mana warga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan air bersih, kompensasi lahan, serta potensi dampak sosial-ekonomi. Sebanyak 12 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan warga terdampak menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat memberikan masukan signifikan terhadap penentuan desain teknis bendungan dan jalur distribusi air. Salah satu hasil konkret dari partisipasi ini adalah penyesuaian arah saluran irigasi untuk mengakomodasi lahan pertanian masyarakat serta penambahan fasilitas penunjang seperti jalur wisata air. Temuan ini memperkuat pandangan (Saputro & Ma'ruf, 2025) Chambers (1997) bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan akan lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan menghasilkan rasa kepemilikan yang kuat terhadap proyek.

Lebih lanjut, bentuk partisipasi masyarakat dapat dianalisis melalui Teori Tangga Partisipasi Arnstein (1969) (Bagus, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori "kemitraan" (partnership), di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga turut memberikan masukan yang memengaruhi keputusan teknis dan sosial proyek. Pemerintah daerah, DPRD, dan pihak pelaksana proyek menunjukkan keterbukaan terhadap usulan masyarakat, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan turut memantau pelaksanaan awal proyek melalui kelompok pemantau lokal yang dibentuk secara sukarela. Namun, tantangan masih ditemukan, terutama terkait dengan keterbatasan informasi teknis dan jadwal proyek yang belum tersampaikan secara merata ke seluruh desa terdampak. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dua arah yang lebih intensif antara pemerintah dan warga.

Partisipasi masyarakat juga memiliki dimensi pemberdayaan sosial dan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Perencanaan Transformatif Friedmann (1987) (Said & Wilopo, 2024). Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam merancang masa depan wilayahnya. Melalui proses diskusi dan konsultasi publik, warga desa berkontribusi dalam penentuan lokasi fasilitas pendukung bendungan seperti area penampungan air, jalur irigasi pertanian, dan potensi pengembangan ekowisata lokal. Pemerintah daerah merespons dengan memasukkan rekomendasi tersebut dalam revisi Detail Engineering Design (DED). Partisipasi semacam ini mencerminkan terbangunnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Secara keseluruhan, hasil temuan terkait tingkat partisipasi masyarakat desa di sekitar Sungai Seratak telah berkembang dari partisipasi simbolik menuju partisipasi substantif yang memberikan dampak nyata terhadap proses perencanaan pembangunan. Meskipun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi publik, transparansi informasi, dan mekanisme pengawasan bersama. Hal ini sejalan dengan Teori Partisipasi Berkelanjutan Pretty (1995), yang menekankan bahwa pembangunan akan berhasil apabila masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan infrastruktur yang dibangun. Dengan demikian, partisipasi masyarakat desa bukan hanya elemen pendukung, melainkan fondasi utama dalam keberhasilan pembangunan Bendungan Seratak sebagai proyek publik berbasis masyarakat.

1. Ketersediaan Air Bersih dan Urgensi Pembangunan

Kabupaten Kotabaru menghadapi masalah serius terkait ketersediaan air bersih, terutama di wilayah Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, dan Pulau Laut Sigam. Hasil observasi lapangan dan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber air baku saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Ketika musim kemarau tiba, debit air sungai menurun drastis, sementara pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi mendorong lonjakan permintaan air bersih. Kondisi ini memaksa sebagian besar masyarakat untuk membeli air dari pedagang swasta dengan harga yang relatif tinggi, yaitu sekitar Rp70.000 per tandon, yang membebani rumah tangga berpendapatan rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pasokan dan permintaan air bersih yang membutuhkan intervensi kebijakan strategis.

Untuk mengatasi krisis air bersih, pemerintah daerah bersama DPRD Kotabaru merencanakan pembangunan Bendungan Seratak sebagai salah satu proyek prioritas. Bendungan ini dirancang untuk menjadi sumber air baku utama bagi rumah tangga, industri kecil, dan sektor pertanian. Studi kelayakan awal menunjukkan bahwa Sungai Seratak memiliki debit air yang cukup besar, yaitu sekitar 600–700 liter per detik, yang memenuhi standar kuantitas dan kualitas air baku untuk penyediaan air bersih dan irigasi (Bappaeda Kotabaru, 2023). Urgensi pembangunan ini diperkuat dengan adanya peningkatan kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk dan berkembangnya kawasan industri di Kotabaru, yang semakin menekan kapasitas infrastruktur air bersih yang ada. Oleh karena itu, Bendungan Seratak dipandang sebagai solusi jangka panjang yang mampu mendukung ketahanan air sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Temuan ini dapat diperkuat dengan Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory) dari Todaro dan Smith yang menekankan bahwa akses terhadap air bersih merupakan salah satu prasyarat penting bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial. Menurut teori ini, penyediaan air bersih memiliki hubungan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Tanpa ketersediaan air bersih, masyarakat akan menghadapi berbagai masalah, termasuk meningkatnya penyakit berbasis air dan biaya ekonomi tambahan untuk memperoleh air. Dalam konteks Bendungan Seratak, penyediaan air baku tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung produktivitas sektor pertanian dan peternakan, yang merupakan basis utama ekonomi lokal. Hal ini mempertegas urgensi proyek bendungan sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis kebutuhan dasar.

Urgensi pembangunan Bendungan Seratak juga dapat dianalisis melalui perspektif Teori Ketahanan Air (Water Security Theory) yang dikemukakan oleh Grey dan Sadoff (Juwono & Subagiyo, 2018), yang menegaskan bahwa ketahanan air merupakan salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan. Teori ini menjelaskan bahwa daerah yang memiliki akses memadai terhadap sumber air bersih cenderung lebih tahan terhadap krisis lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan kondisi geografis Kotabaru yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir, ketersediaan air baku sangat dipengaruhi oleh fluktuasi musim dan kualitas sumber daya air permukaan. Oleh karena itu, pembangunan Bendungan Seratak menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pasokan air bersih, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air alternatif, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 6 tentang akses universal terhadap air bersih dan sanitasi layak.

2. Perencanaan Berbasis Masyarakat

Perencanaan berbasis masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perumusan kebijakan hingga implementasi proyek (Yustiyanto, 2025). Dalam konteks pembangunan Bendungan Seratak, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas PUPR dan Bappeda melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, tokoh adat, dan perwakilan warga Sungai Seratak, melalui forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (*Musrenbang*) serta FGD

bersama tenaga ahli peneliti. Pendekatan ini memungkinkan kebutuhan riil masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam dokumen *Detail Engineering Design (DED)* bendungan, sehingga hasil perencanaan lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi lokal. Sejalan dengan pendapat Chambers (1997), pembangunan partisipatif merupakan strategi efektif untuk memastikan proyek benar-benar relevan, inklusif, dan berkelanjutan, karena masyarakat lokal memahami permasalahan dan potensi daerahnya lebih baik (Wirdanengsih & Anwar, 2025).

Pendekatan ini dapat dianalisis melalui Teori Partisipasi Arnstein (1969) yang dikenal dengan *Ladder of Citizen Participation* (Masjhoer, 2025). Arnstein menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi ke dalam delapan tangga, mulai dari manipulasi, konsultasi, kemitraan, hingga kendali warga (Masjhoer, 2025). Dalam kasus Bendungan Seratak, proses perencanaan berada pada tahap “kemitraan” (partnership), di mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tetapi kebijakan utama tetap dipegang oleh pemerintah daerah. Bukti konkret keterlibatan masyarakat terlihat dalam rapat koordinasi pembangunan, di mana usulan terkait tata letak bendungan, penentuan jalur distribusi air, dan kompensasi lahan diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa proyek Bendungan Seratak telah bergerak menuju model pembangunan partisipatif yang substansial, bukan sekadar formalitas konsultasi.

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat sekitar Sungai Seratak telah diakomodasi dalam DED Bendungan Seratak. Selain itu hasil FGD yang dilakukan, warga mengusulkan agar proyek ini tidak hanya fokus pada penyediaan air baku untuk rumah tangga, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan irigasi pertanian dan peternakan dan pengembangan wisata. Pemerintah daerah merespons dengan menambahkan jalur distribusi air menuju area pertanian produktif dan kawasan peternakan masyarakat. Menurut Friedmann (1987) dalam teorinya tentang perencanaan transformatif, perencanaan berbasis masyarakat dapat meningkatkan pemberdayaan lokal karena warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut memengaruhi proses dan hasil pembangunan. Penerapan konsep ini terlihat jelas dalam konteks Bendungan Seratak, di mana masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi realisasi proyek.

Meskipun pendekatan partisipatif telah diupayakan, hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat beberapa tantangan implementasi. Salah satunya adalah kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya terkait transparansi anggaran dan jadwal pembangunan. Selain itu, sebagian masyarakat mengeluhkan kurangnya sosialisasi terkait dampak lingkungan, termasuk potensi alih fungsi lahan dan risiko terganggunya habitat sungai. Temuan ini sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff (1980) yang menekankan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat memerlukan komunikasi dua arah yang intensif antara pemerintah dan warga. Tanpa mekanisme komunikasi yang baik, partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolik dan kurang berdampak pada kualitas perencanaan (Rahmadina, 2025).

Perencanaan berbasis masyarakat dalam pembangunan Bendungan Seratak bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga berperan penting dalam membangun rasa kepemilikan (sense of ownership) di kalangan masyarakat. Dengan melibatkan warga secara aktif, tingkat dukungan terhadap proyek meningkat dan potensi konflik sosial dapat diminimalisasi. Menurut Pretty (1995) dalam Teori Partisipasi Berkelanjutan, partisipasi yang substansial akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga infrastruktur yang dibangun (Saputro & Ma'ruf, 2025b). Dalam konteks Bendungan Seratak, partisipasi masyarakat tidak hanya memengaruhi keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pasokan air bersih dan pemanfaatannya secara merata di masa depan.

3. Kelayakan Teknis dan Potensi Sungai Seratak

Sungai Seratak merupakan salah satu sumber daya air strategis di Kabupaten Kotabaru yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai penyedia air baku, irigasi pertanian, dan

pengendalian banjir. Hasil survei awal yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kotabaru menunjukkan bahwa debit rata-rata Sungai Seratak mencapai 600–700 liter per detik, cukup untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga dan sektor pertanian di tiga kecamatan utama di Pulau Laut. Selain itu, kualitas air Sungai Seratak juga memenuhi baku mutu air bersih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan ketersediaan potensi air ini, pemerintah daerah menetapkan Sungai Seratak sebagai lokasi prioritas pembangunan bendungan karena memenuhi syarat hidrologis dan ekologis untuk penyediaan air baku jangka panjang.

Kajian kelayakan teknis Bendungan Seratak dilakukan melalui analisis geoteknik, topografi, hidrologi, dan lingkungan. Hasil studi menunjukkan bahwa karakteristik morfologi sekitar Sungai Seratak mendukung pembangunan bendungan tipe urugan dengan inti kedap (*earth-fill dam*), yang dinilai lebih efisien untuk kondisi tanah aluvial di kawasan tersebut. Menurut Triatmodjo (2013) dalam Teori Rekayasa Sumber Daya Air, pemilihan desain bendungan harus mempertimbangkan kestabilan lereng, daya dukung tanah, dan kapasitas tampungan air agar infrastruktur aman dan berfungsi optimal. Dengan kapasitas tampungan yang direncanakan mencapai 1,2 juta meter kubik, bendungan ini dinilai mampu mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mendukung sistem irigasi pertanian secara berkelanjutan (Supit et al., 2025).

Dari sisi hidrologi, Sungai Seratak memiliki potensi besar dalam menjamin ketahanan air di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan analisis curah hujan selama 10 tahun terakhir, daerah tangkapan air di sekitar Sungai Seratak memiliki tingkat ketersediaan air relatif stabil, dengan rata-rata curah hujan tahunan mencapai 2.300–2.800 mm. Temuan ini sesuai dengan Teori Manajemen Sumber Daya Air oleh Grey dan Sadoff (2007), yang menekankan pentingnya memanfaatkan kapasitas hidrologi daerah aliran sungai untuk menjamin keberlanjutan pasokan air bersih (Hafidh et al., n.d. 2024). Dengan memanfaatkan Sungai Seratak sebagai sumber utama, bendungan dapat menampung air secara optimal pada musim hujan dan mendistribusikannya pada musim kemarau, sehingga mampu mengurangi risiko kekeringan dan fluktuasi pasokan air baku.

Selain sebagai penyedia air baku untuk rumah tangga, Sungai Seratak memiliki potensi besar untuk mendukung irigasi pertanian masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil observasi, sekitar 320 hektar lahan pertanian produktif di wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur dan Pulau Laut Sigam sangat bergantung pada pasokan air dari sungai ini. Pembangunan bendungan akan meningkatkan distribusi air ke sawah dan kebun, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan lokal. Hal ini selaras dengan pendapat Mays (2011) dalam Teori Perencanaan Infrastruktur Air, yang menyatakan bahwa pembangunan bendungan berperan penting dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan, terutama pada daerah dengan ketersediaan air permukaan terbatas pada musim kemarau. Dengan demikian, Bendungan Seratak tidak hanya strategis untuk penyediaan air bersih, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis agrikultur.

Meskipun kelayakan teknis Sungai Seratak cukup tinggi, pembangunan bendungan juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain perubahan ekosistem sungai, penurunan biodiversitas, serta alih fungsi lahan di sekitar area proyek. Menurut Leopold (1971) dalam Teori Analisis Dampak Lingkungan, proyek bendungan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan menyediakan rencana mitigasi yang jelas. Dalam kasus Bendungan Seratak, Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru telah merekomendasikan penerapan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kompensasi lahan untuk masyarakat terdampak. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi konflik sosial dan menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitar Sungai Seratak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi Sungai Seratak dan kelayakan teknis pembangunan bendungan memiliki hubungan erat dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Proyek ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi juga

untuk mendukung irigasi pertanian, meningkatkan ketahanan air, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Perspektif ini sejalan dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 6 tentang akses terhadap air bersih dan sanitasi serta SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Dengan integrasi aspek teknis, sosial, dan ekologis, Bendungan Seratak diharapkan dapat menjadi model pembangunan fasilitas publik berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru.

4. Perspektif Masyarakat dari dampak Ekonomi dan sosial pembangunan bendungan seratak

Masyarakat sekitar Sungai Seratak memiliki persepsi yang beragam terhadap pembangunan Bendungan Seratak. Sebagian besar masyarakat menyambut baik proyek ini karena dianggap dapat meningkatkan ketersediaan air bersih dan mendukung produktivitas pertanian. Namun, sebagian warga merasa khawatir terhadap potensi alih fungsi lahan, hilangnya ruang hidup, dan perubahan ekosistem sungai. Menurut (Syahrani & Soetomo, 2019), persepsi masyarakat terhadap pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat informasi, keterlibatan dalam proses perencanaan, dan persepsi manfaat ekonomi yang akan diperoleh. Dalam konteks Bendungan Seratak, hasil survei menunjukkan 72% responden mendukung proyek, sedangkan sisanya bersikap skeptis karena khawatir akan dampak sosial dan lingkungannya.

Analisis perspektif masyarakat dapat dijelaskan melalui Teori Dampak Sosial dari Broom dan Selznick (Kolip, 2011), yang menyatakan bahwa pembangunan besar seperti bendungan akan memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci untuk mengurangi resistensi terhadap proyek. Dalam pembangunan Bendungan Seratak, pemerintah daerah dan kontraktor pelaksana melakukan forum diskusi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Proses ini memberikan ruang untuk menjelaskan manfaat proyek sekaligus membahas risiko yang mungkin timbul. Partisipasi aktif masyarakat membantu mengurangi konflik sosial dan meningkatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun.

Dari sisi sosial, pembangunan Bendungan Seratak membawa dampak signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat sekitar. Sebagian warga yang sebelumnya mengandalkan hasil tangkapan ikan di Sungai Seratak harus beradaptasi dengan perubahan ekosistem sungai pasca-pembangunan. Menurut Scott (Sunarti et al., 2017) dalam teorinya tentang resiliensi sosial, masyarakat lokal memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan apabila diberikan akses terhadap informasi dan alternatif sumber penghidupan. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Perikanan memberikan program pendampingan serta pelatihan bagi nelayan lokal untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya di area sekitar bendungan. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Secara ekonomi, keberadaan Bendungan Seratak berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan sektor pariwisata. Menurut Todaro dan Smith (Sulistiawati, 2021) dalam Teori Pembangunan Ekonomi, infrastruktur publik yang memadai, termasuk penyediaan air baku dan irigasi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 65% petani di Kecamatan Pulau Laut Timur dan Pulau Laut Sigam memproyeksikan peningkatan hasil panen sebesar 20-30% pasca-beroperasinya bendungan. Selain itu, potensi ekowisata di sekitar bendungan dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui jasa wisata perahu, kuliner lokal, dan homestay.

Meskipun terdapat potensi manfaat ekonomi, hasil dilapangan juga menemukan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya air yang berpotensi memunculkan konflik sosial antarwarga. Sebagian kelompok masyarakat khawatir bahwa distribusi air dari Bendungan Seratak akan lebih memprioritaskan sektor industri daripada kebutuhan rumah tangga dan pertanian lokal. Teori Keadilan Sosial Rawls (1971) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur publik harus memastikan distribusi manfaat yang merata bagi seluruh lapisan

masyarakat. Oleh karena itu, perlu kebijakan alokasi air yang transparan dan adil, disertai pengawasan masyarakat untuk mencegah monopoli sumber daya air oleh kelompok tertentu atau pihak swasta.

Pembangunan Bendungan Seratak juga memunculkan perubahan pada struktur sosial dan relasi antarwarga. Sebagian masyarakat yang lahannya terdampak proyek harus direlokasi ke wilayah baru, sehingga terjadi penyesuaian terhadap norma sosial dan budaya setempat. Menurut Cernea (2000) dalam Teori Pemindahan Penduduk dan Risiko Sosial, proyek pembangunan besar sering kali memaksa komunitas untuk beradaptasi terhadap lingkungan sosial yang baru, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan marginalisasi sosial. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah menyediakan kompensasi lahan, program pemberdayaan ekonomi, dan fasilitasi integrasi sosial agar masyarakat terdampak tidak kehilangan akses terhadap sumber mata pencaharian dan layanan dasar.

Secara keseluruhan, perspektif masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan Bendungan Seratak memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, namun juga membawa risiko konflik sosial dan degradasi lingkungan jika tidak dikelola dengan tepat. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat perlu diperkuat agar suara warga terdampak menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan dari Sachs (2015), yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan proyek Bendungan Seratak sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengelola dampak sosial-ekonomi secara inklusif dan berkeadilan.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil Temuan dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan Bendungan Seratak di Kabupaten Kotabaru memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketersediaan air bersih, mendukung irigasi pertanian, serta memperkuat ketahanan air di wilayah sekitar. Dari aspek teknis, Sungai Seratak dinilai layak dikembangkan sebagai sumber air utama karena memiliki debit yang stabil, kualitas air yang memenuhi baku mutu, serta kondisi topografi yang mendukung pembangunan bendungan. Temuan ini sejalan dengan Teori Rekayasa Sumber Daya Air (Triatmodjo, 2013), yang menekankan pentingnya analisis hidrologi, geoteknik, dan kapasitas tampungan dalam memastikan keberhasilan proyek bendungan. Dengan kapasitas tampung sebesar 1,2 juta meter kubik, Bendungan Seratak dirancang untuk menjadi salah satu infrastruktur kunci penyediaan air baku dan irigasi bagi masyarakat.

Dari sisi sosial dan ekonomi, pembangunan Bendungan Seratak memberikan manfaat yang signifikan, tetapi juga memunculkan tantangan yang perlu diantisipasi. Di satu sisi, bendungan ini berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian hingga 20–30%, memperluas peluang ekonomi berbasis ekowisata, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Namun, di sisi lain, proyek ini juga menimbulkan risiko sosial, seperti alih fungsi lahan, potensi konflik distribusi air, serta dampak terhadap ekosistem sungai. Mengacu pada Teori Keadilan Sosial Rawls (1971), keberhasilan pembangunan bergantung pada sejauh mana manfaat proyek didistribusikan secara merata dan inklusif kepada seluruh masyarakat terdampak. Oleh karena itu, pengelolaan dampak sosial-ekonomi menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis, pembangunan Bendungan Seratak memerlukan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dan integrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditekankan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi serta SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan perlu diperkuat agar proyek ini dapat berjalan efektif dan inklusif. Selain itu, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengelolaan air berbasis keadilan, serta diversifikasi program pemberdayaan ekonomi menjadi rekomendasi utama untuk memaksimalkan manfaat dan

meminimalisasi risiko. Dengan strategi tersebut, bendungan Seratak diharapkan dapat menjadi contoh praktik terbaik pembangunan fasilitas publik berbasis masyarakat di Kabupaten Kotabaru dan wilayah lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder Of Citizen Participation*. Journal Of The American Planning Association, 35(4), 216–224.
- Bappeda Kabupaten Kotabaru. (2023). *Laporan Rencana Induk Pembangunan Bendungan Seratak*. Kotabaru: Pemerintah Kabupaten Kotabaru
- Bagus, C. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Tangguh Semeru. *Janaloka*, 1(2), 44–69.
- Guampe, F. A. (2024). Pengantar Ekonomi Pembangunan. *Penerbit Tahta Media*. <https://Tahtamedia.Co.Id/Index.Php/Issj/Article/View/1018>
- Hafidh, R. A., Widianingsih, I., & Buchari, A. (N.D.). *Kapasitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Air Berbasis Masyarakat Pedesaan Di Desa Srogol Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor*.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2018). *Sumber Daya Air Dan Pengembangan Wilayah: Infrastruktur Keairan Mendukung Pengembangan Wisata, Energi, Dan Ketahanan Pangan*. Universitas Brawijaya Press.
- Kolip, E. M. S. Dan U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Kencana.
- Masjhoer, J. M. (2025). *Konsep Dan Teori: Partisipasi Masyarakat Perdesaan Dalam Pengurangan Sampah*. Jussac M Masjhoer.
- Rahmadina, D. P. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan Tahun 2023. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 92–108. <https://doi.org/10.62383/Kajian.V2i3.564>
- Said, A., & Wilopo. (2024). *Kolaborasi Perencanaan Pembangunan*. Deepublish.
- Saputro, A. H., & Ma'ruf, M. F. (2025a). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Umum Di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 5(2). <https://sasanti.or.id/ojs/index.php/jda/article/view/177>
- Saputro, A. H., & Ma'ruf, M. F. (2025b). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Umum Di Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 5(2). <https://sasanti.or.id/ojs/index.php/jda/article/view/177>
- Sulistiawati, R. (2021). *Transisi Demografi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kalimantan Barat*.
- Sunarti, E., Islamia, I., Rochimah, N., & Ulfa, M. (2017). Pengaruh Faktor Ekologi Terhadap Resiliensi Remaja. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 10(2), 107–119. <https://doi.org/10.24156/Jikk.2017.10.2.107>
- Supit, C. J., Oroh, F. M., Sumarauw, J. S. F., Waani, J. E., Riogilang, H., & Riogilang, H. (2025). *Infrastruktur Berkelanjutan: Kolaborasi Lintas Bidang Teknik Sipil*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Syahrani, A., & Soetomo, S. (2019). Persepsi Motivasi Menetap Atau Pindah Masyarakat Terhadap Dampak Perubahan Pemanfaatan Lahan Di Kampung Baterman Dan Petempen. *Teknik Pwk (Perencanaan Wilayah Kota)*, 8(1), 29–38. <https://doi.org/10.14710/Tpwk.2019.23844>
- Wirdaningsih, & Anwar, S. (2025). *Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Perspektif Sosial*. Deepublish.
- Yustiyanto, R. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 4(1), 88–95.